

**Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2019 - 2023**

Visi

MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERKUALITAS DAN SETARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI

Misi

1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERBASIS PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
2. MENGHADIRKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.
3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER DAN AGAMAI

Strategi

1. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Peningkatan kerjasama dan otonomi daerah
5. Administrasi kewilayahan
6. Penataan administrasi pemerintahan umum
7. Pembinaan dan Peningkatan pelayanan Masyarakat
8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
10. Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah
11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
12. Kinerja Dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
13. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
14. Dokumentasi kebijakan dan kedinasan pimpinan daerah
15. Pelayanan Administrasi Perkantoran
16. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
17. Peningkatan Disiplin Aparatur
18. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
19. Peningkatan sarana prasarana pendukung Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
20. Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan

Kebijakan

1. Pengendalian pendistribusian BBM dan gas elpiji
2. Pelaksanaan pengendalian inflasi daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Micro Kecil Menengah
4. Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah
5. Percepatan akses keuangan daerah
6. Pembentukan dan Evaluasi BUMD
7. Pengendalian Pemanfaatan SDA
8. Peningkatan akuntabilitas kinerja
9. Peningkatan Reformasi Birokrasi
10. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
11. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peningkatan kerjasama daerah
13. Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
14. Pelaksanaan lomba kelurahan
15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelurahan
16. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan
17. Peningkatan pelayanan publik
18. Peningkatan ketatalaksanaan
19. Perumusan Kebijakan SDM Aparatur
20. Penataan Kelembagaan
21. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
22. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
23. Publikasi peraturan perundang-undangan
24. Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum
25. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
26. Kabupaten/Kota Peduli HAM
27. Penyusunan Standar satuan harga 2020
28. Evaluasi Pelaksanaan DAK
29. Evaluasi TEPPRA
30. Pengendalian Administrasi Pembangunan
31. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD
32. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1.1	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	1.1.1	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen (%)	90		100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah	2.1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	2.1.1	SAKIP	Huruf dan Angka	90		72	80.01	85
		2.2	Meningkatnya Fasilitas Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	2.2.1	LPPD	Huruf dan Angka			3.21	3.22	3.23
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1	Meningkatnya pengaruh kebijakan pelayanan publik terhadap nilai IKM	3.1.1	Skor Rata-Rata IKM	Huruf dan Angka			85	88.35	88.5
		3.2	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3.2.1	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen (%)			100	100	100
		3.3	Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	3.3.1	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai aturan	Persen (%)			100	100	100
		3.4	Meningkatkan akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	3.4.1	Persentase akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen (%)			100	100	100
		3.5	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	3.5.1	Persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti	Persen (%)			100	100	100
		3.6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	3.6.1	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Persen (%)			100	100	100